

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan isi skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa menurut pandangan Cak Nur, urgensi parpol oposisi pada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak dapat ditawar. Ada beberapa alasan; *Pertama*, oposisi merupakan bagian dari sejarah demokrasi di Indonesia. Meski corak dan dinamika oposisi di setiap masa berbeda-beda, tetapi benih-benih oposisi tetap tumbuh dan berkembang hingga di masa-masa setelahnya. Jejak oposisi bahkan telah dimulai dari masa Demokrasi Parlementer (1950-1959), berlanjut ke masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan hingga saat ini di masa Reformasi Demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, pernyataan Prabowo bahwa, oposisi bukanlah produk demokrasi Indonesia dan karena itu tidak diperlukan, merupakan sebuah kegagalan presiden dalam membaca ulang sejarah. Lebih dari itu, keputusan Prabowo-Gibran yang merangkul mayoritas parpol di parlemen ke dalam koalisi pemerintah adalah sebuah kebijakan politik yang tidak mencerminkan semangat demokrasi.

Kedua, demokrasi adalah akar oposisi. Menurut Cak Nur, oposisi adalah instrumen demokrasi yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Sebab, peran dan fungsi oposisi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan pemerintah adalah kunci kemaslahatan demokrasi. Namun, Cak Nur juga sangat menekankan dilembagakannya oposisi dalam partai politik agar mekanisme *check and balance* dapat berjalan maksimal dan efektif. Sebab, bila berkaca dari kehidupan dan pengalaman Cak Nur yang tidak bergabung ke dalam parpol manapun, kendaraan politik (baca: parpol oposisi) amat diperlukan demi memaksimalkan peran dan fungsi oposisi. Artinya, kebijakan untuk mengkerdilkan parpol oposisi, apalagi menghapusnya dari negara demokrasi merupakan tindakan yang mengancam keberlanjutan demokrasi itu sendiri, seperti yang dilakukan Prabowo-Gibran. Keputusan pasangan ini untuk merangkul 6 dari 8 parpol di parlemen ke dalam koalisi pemerintah merupakan langkah yang membahayakan demokrasi di Indonesia. Sebab, komposisi antara koalisi dan oposisi di parlemen menjadi tidak berimbang. Hasilnya, banyak keputusan pemerintah yang mudah diloloskan oleh

DPR, padahal kebijakan-kebijakan tersebut masih cacat dan jauh dari kepentingan rakyat. Sebut saja program MBG, Koperasi Merah Putih, impor mobil dan motor, atau bahkan wacana Pilkada tidak langsung, yang jauh dari partisipasi publik dan tidak berpihak pada rakyat. Hal ini dapat terjadi karena parpol oposisi dilemahkan pengaruhnya di DPR.

Ketiga, oposisi adalah corong suara minor. Menurut Cak Nur, lewat parpol oposisilah suara protes dan kritik dari masyarakat dapat sampai ke telinga pemerintah. Pasca era reformasi, peran parpol oposisi terlihat sangat penting dalam meneruskan pesan ketidakpuasan rakyat kepada pemerintah. Misalnya, saat PDIP konsisten beroposisi terhadap pemerintahan SBY selama 10 tahun, banyak kebijakan pemerintah yang dikritik keras oleh PDIP. Selain itu, oposisi yang tidak terlembagakan atau *de facto* tidak ada, akan cenderung menjadi *oposisionalisme* semata. Oposisi model inilah yang tidak diharapkan oleh Cak Nur. Oleh karena alasan tersebut, keputusan Prabowo-Gibran untuk menghilangkan parpol oposisi dari peta politik Indonesia sama dengan upaya pembungkaman terhadap suara rakyat. Padahal, pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang dibangun atas dasar sikap saling mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat.

Keempat, oposisi mencegah Indonesia jatuh ke dalam otoritarianisme, kesewenang-wenangan eksekutif, dan pelemahan oposisi sipil. Menurut Cak Nur, salah satu alasan oposisi menjadi penting ialah untuk mencegah negara jatuh pada jebakan otoritarianisme. Alasannya, tanpa pengawasan dan penyeimbangan oleh oposisi, pemerintah dapat mempraktikkan kekuasaannya secara “suka-suka”, yang jauh dari semangat demokratis. Selain itu, Cak Nur juga berpendapat bahwa manusia (baca: presiden) selalu berpotensi dikuasai oleh *vested interest* masing-masing, yang sering bertolak belakang dengan kepentingan bersama (*bonum comuna*). Hal ini nyata bila mengingat kembali sejarah bangsa Indonesia di masa Orde Lama dan Orde Baru. Di mana, kekuatan parpol oposisi di kedua masa itu benar-benar ditekan oleh pemerintah. Hasilnya, pemerintah menjadi *power full* dalam setiap pengambilan kebijakan, dan rakyat hanya dapat menerima setiap keputusan yang dibuat. Apalagi, dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kesewenang-wenangan pemerintah terlihat semakin kuat. Hal ini tampak dalam

sejumlah kebijakan strategis negara yang diambil tanpa melibatkan peran lembaga legislatif dan masyarakat umum. Belum lagi, sejumlah kasus teror dan intimidasi yang dialami oleh kelompok oposisi sipil, yang terdiri dari mahasiswa dan pers, semakin menunjukkan kemunduran semangat demokratis di Indonesia. Keadaan ini persis seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, dan tentu saja memori kelam ini tidak diharapkan untuk bangkit kembali di masa pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.

Kelima, demokrasi mesti menjadi *the way of life*. Cak Nur berpendapat bahwa seorang pemimpin sejati mesti sanggup menjadikan demokrasi sebagai cara hidupnya (*the way of life*). Pandangan ini berangkat dari nasehat Al'Quran bahwa, kekuasaan merupakan pemberian dari Allah sehingga mesti digunakan untuk kepentingan banyak orang, dan demokrasi adalah jalannya. Ia menambahkan bahwa pemimpin yang mampu menghayati demokrasi sebagai cara hidup adalah pemimpin yang bijaksana. Besar harapan agar hal ini dapat disadari oleh Prabowo-Gibran, sebagai pemimpin Indonesia yang juga beragama Islam. Sebab, bila keduanya mampu menghayati demokrasi sebagai cara hidup, maka setiap kebijakan politik mereka akan bersifat demokratis, termasuk menghargai peran oposisi. Namun, bila berkaca pada situasi politik tanah air saat ini, di mana 7 dari 8 parpol parlemen bergabung ke dalam koalisi pemerintah, maka agaknya masih jauh panggang dari api. Prabowo-Gibran mungkin tidak memahami demokrasi, apalagi untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Bagaimana tidak, selain kabinet mereka yang bongsor karena diisi oleh banyak parpol koalisi, kebijakan-kebijakan yang dibuat pun jauh dari prinsip demokratis. Hal ini dapat dimaklumi sebab peran pengawasan dan penyeimbangan oleh parpol oposisi di parlemen tidak efektif karena mayoritas parpol merapat ke pelukan pemerintah.

5.2 Saran

Berdasarkan kajian dalam skripsi ini, penulis dapat menyarankan beberapa hal untuk beberapa pihak. *Pertama*, bagi para akademisi yang hendak membedah urgensi oposisi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam perspektif Cak Nur. Karya ini adalah tulisan filosofis yang dapat dijadikan sebagai sumber penting untuk memahami konsep oposisi menurut Cak Nur. Lewat uraian di dalam karya

ini, latar belakang pemikiran, konsep oposisi, dan relevansinya masih relevan untuk digunakan, terutama untuk membedah urgensi oposisi bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran. Apalagi, ke depannya, kajian-kajian seputar pemerintahan Prabowo-Gibran akan terus bermunculan, dan salah satu perspektif yang dapat digunakan adalah konsep oposisi Cak Nur. Oleh karena itu, karya ini dapat menjadi sumber perbandingan yang relevan untuk penelitian seputar topik yang sama di masa depan.

Kedua, bagi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Hendaknya gagasan-gagasan Cak Nur, terutama konsep oposisi, dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kuliah bagi para mahasiswa. Pembahasan mengenai pemikirannya dapat dijadikan bagian dari mata kuliah Etika Politik atau Filsafat Islam misalnya, yang selama ini telah menjadi mata kuliah wajib di Prodi Filsafat. Sebab, dengan begitu, mahasiswa dapat diperkenalkan dengan perspektif baru dari pemikir Indonesia, yang tentunya lebih kontekstual dengan keadaan politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ensiklopedia

- Rachman, Budhy Munawar. "Ensiklopedi Nurcholish Madjid: Pemikiran Islam di Kanvas Peradaban." *Nurcholish Madjid*. Penerbit MIZAN, 2006.
- Sudirman, Adi. *Ensiklopedia Sejarah Lengkap Indonesia*. Diedit oleh Rusdianto. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.

2. Buku

- Abdurachman, Dzulqarnain Andira, dan Adinda Tania Dewanti. *Sang Jendral Prabowo Subianto: Pemimpin yang Ikhlas*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2024.
- AF, Ahmad Gaus. *Api Islam Nurcholish Madjid: Jalan Hidup Seorang Visioner*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.
- Ambardi, Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Diterjemahkan oleh Zaim Rofiqi. Jakarta: KPG, 2009.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES, 1996.
- Hill, David T. *Pers di Masa Orde Baru*. Diterjemahkan oleh Gita Widya Laksimini Soerjoamodjo. I. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- HM, Zaenuddin. *Prospek Gerakan Oposisi: Dalam Era Pemerintahan Gus Dur-Megawati*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Joko, Pitono. *Soekarno Obor yang Tak Pernah Padam*. Surabaya: Grammatical Publishing, 2015.
- Junaedi, Asep Mahbub. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan, Dan Masa Depan Konstitusi*. Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2025.

- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia: Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan Pustaka, 1987.
- Pujosantoso, Sudarwanto. *Demokrasi Liberal (1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (1959-1966)*. Pontianak: Derwati Press, 2019.
- Said, Muhtar, Ahmad Nasrullah, Brahma Aryana, Mu'ammarr Rizal Iftikhor Fauzi, dan Sulaiman. *Matinya Demokrasi*. Jakarta Barat: Teras Karsa Publisher, 2021.
- Soemantri, Sri. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sofyan, Ahmad A., dan M. Roychan Madjid. *Gagasan Cak Nur tentang Negara dan Islam*. Yogyakarta: Titisan Ilahi Press, 2003.
- Sukrino, Didik, dan Suparman Adi Winoto. *Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila*. Malang: Inara Publisher, 2022.

3. Buku yang Diedit

- Abdullah, Aminol Rosid. *Integrasi Agama dan Sains: Perspektif Nurcholish Madjid dan Jalaluddin Rakhmat*. Diedit oleh Faizul Munir. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Daalder, Hans. "The Netherlands: Opposition in a Segmented Society." In *Political Opposition in Western Democracies*, diedit oleh Robert A. Dahl. New Haven and London: Yale University Press, 1966.
- Harman, Benny K. *Negeri Mafia Republik Koruptor: Menggugat Peran DPR Reformasi*. Diedit oleh Bona Beding. Yogyakarta: Lamalera, 2012.
- Ma'ruf, Ade. *Prabowo Subianto: Jalan Terjal Seorang Jenderal*. Diedit oleh Aziz Safa. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Madjid, Nurcholish. *Cendekiawan & Religiusitas Masyarakat*. Diedit oleh Budhy Munawar Rachman. Jakarta Timur: Paramadina, 2009.

- . “Oposisi suatu Kenyataan.” In *Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*, diedit oleh Edy A. Effendi dan Nurcholish Madjid, 6. Cet. 1. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Mainwaring, Scott. “Presidentialism in Latin America.” In *Parliamentary Versus Presidential Government*, diedit oleh Arendt Lijphart. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Power, Thomas P. “Serangan Atas Akuntabilitas: Politisasi Penegakan Hukum, Pemaksaan Partisan, Dan Penggelembungan Kekuasaan Eksekutif Di Bawah Pemerintahan Jokowi.” In *Demokrasi Di Indonesia: Dari Stagnasi Ke Regresi*, edited by Thomas Power and Eve Warbuton, 389–424. Jakarta: KPG, 2021.
- Romli, Lili. *Partai Politik: Dinamika dan Problematik Pelembagaan di Indonesia*. Diedit oleh Efriza. Malang: Intrans Publishing, 2021.
- Stepan, Alfred. “Paths toward Redemocratization: Theoretical and Comparative Considerations.” In *Transitions from Authoritarian Rule: Comparative Perspectives*, diedit oleh Guillermo O’ Donnel, Philippe C. Schmitter, dan Laurance Whitehead, 64–84. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1991.
- Suhaeri, Muhlis. “Aspek Pemikiran Cak Nur di Bidang Politik.” In *Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, diedit oleh Mochamad Ziaul Haq dan MT. Rahman, 137–141. Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 2022.
- Supriyedi. “Fungsi dan Peran Oposisi.” In *Oposisi Pemerintahan Menurut Hukum Islam*, diedit oleh Rizki Maharani, 71–94. Indramayu: PT Adab Indonesia, 2025.
- Wibisana, Teddy, Nanang Pujalaksana, dan Rahadi T. Wiratama. *ALDERA: Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999*. Diedit oleh Marlin Dinamikanto. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2022.

4. Jurnal Ilmiah

- Admojo, Tuswoyo. "Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014." *Jurnal Politik* 1, no. 2 (2016).
- Argenti, Gili, dan Dini Sri Istiningdias. "Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin." *Jurnal Politikom Indonesiana* 2, no. 2 (2017): 14–27.
- Azra, Azyumardi. "Membaca Cak Nur: Pemikiran dan Praksis Sosial Politik." *Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban* 11, no. 2 (2019): 9–19.
- Fajri, Pujangga Candrawijyaning. "Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)." *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2023): 241–258.
- Fajriyah, Ismi Ajeng, Lailatul Riskiyeh, dan Khoirul Mufid. "Politik Hukum Di Era Prabowo: Antara Demokrasi Dan Sentralisasi Kekuasaan." *CAUSA: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 13, no. 9 (2025).
- Kumaat, Jackson Andre William. "Analisis Wacana Media Kompas.com dan Akun YouTube Sekretariat Presiden terhadap Simbolisasi Presiden Joko Widodo pada Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo 2018 dan Pilpres 2024." *Ilmu dan Budaya* 45, no. 2 (2024): 109–116.
- Kurniawan, Dhani. "Demokrasi Indonesia dalam Lintasan Sejarah Yang Nyata dan Yang Seharusnya." *MOZAIK: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora* 8, no. 1 (2016): 94–111.
- Madjid, Nurcholish. "Demokrasi, Demokratisasi, dan Oposisi." *Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban* 3, no. 2 (2011): 21–30.
- Naben, Kristianto Ratu Marius, dan Alfian Tanggang. "Kritik Terhadap Upaya Jokowi Menghapus Oposisi Dari Perspektif Demokrasi Menurut Pandangan Cak Nur." *SABANA (Sosiologi, Antropolgi, dan Budaya Nusantara)* 4, no. 3 (2025): 391–403.
<https://journal.literasisains.id/index.php/sabana/article/view/5629/2680>.

- Nafis, Muhamad Wahyuni. "Berpijak Pada Warisan Intelektualisme Cak Nur." *Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban* 9, no. 1 (2016): 35–58.
- . "Nurcholish Madjid, Sosok Pribadi Pengimbang." *Titik-Temu: Jurnal Dialog Peradaban* 3, no. 2 (2011): 31–42.
- Noor, Firman. "Oposisi Dalam Kehidupan Demokrasi : Arti Penting Keberadaan Oposisi sebagai bagian Penguatan Demokrasi di Indonesia." *Masyarakat Indonesia* 46, no. 1 (2016): 3. <https://media.neliti.com/media/publications/152332-ID-oposisi-dalam-kehidupan-demokrasi-arti-p.pdf>.
- Pambudi, Gatien. "Efisiensi atau Oligarki? Analisis Wacana Prabowo Mengenai Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD." *Jocer: Journal of Civic Education Research* 3, no. 2 (2025): 50–66.
- Pratama, D A. "Peran Partai Oposisi Dalam Demokrasi Ketatanegaraan Indonesia." *Otentik Law Journal* 3, no. 1 (2025): 1–13. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/OLJ/article/view/6561>.
- Toyibi, Vicko Wahyu Rifan. "Peran dan Keterlibatan Partai Politik Oposisi dalam Mengawal Demokrasi: Pendekatan Checks and Balances dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal of Social and Economics Research* 6, no. 2 (2024): 539–549. <https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER/article/view/609/527>.
- Wijaya, Arif. "Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia." *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 4, no. 01 (2014): 136–158.

5. Majalah

- Hermawan, Erwan, Egy Adyatama, Hussein Abri Dongoran, Anastasya Lavenia, dan Advist Khoirunikmah. "Satu Atap Hilang Wibawa." *Tempo*. Jakarta Selatan, November 2024.
- Rikang, Raymundus, Francisca Christy Rosana, dan Hussein Abri Dongoran. "Akhir Era Paman Gibran." *Tempo*. Jakarta Selatan, November 2023.

Rosana, Francisca Christy, dan Hussein Abri Dongoran. “Paman Datang Beres Urusan.” *Tempo*. Jakarta Selatan, Oktober 2023.

6. Berita dan Publikasi Online

Hadjar, Abdul Fickar. “Koalisi dan Oposisi dalam (Praktik) Politik Indonesia.” *HukumOnline.com*. Last modified 2024. Diakses September 30, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-dan-oposisi-dalam-praktik-politik-indonesia-lt67250da47a357/?page=1>.

Harbowo, Nikolaus. “Megawati: Demokrasi Sehat Menuntut Keseimbangan Kekuasaan.” *KOMPAS.id*. Last modified 2026. Diakses Maret 18, 2026. https://www.kompas.id/artikel/megawati-demokrasi-sehat-menuntut-keseimbangan-kekuasaan?open_from=Tagar_Page.

Hidayatulloh, Taufik, dan Izzul Muna. “Corak Pemikiran Nurcholish Madjid dalam Bingkai Politik Kebangsaan di Indonesia.” *Filsafat Indonesia* 7, no. 3 (2024): 551–561.

Idrus, Pizaro Gozali. “Analisis dan Aktivis HAM Nilai ‘ancaman’ Prabowo Kepada Oposisi Berbahaya Bagi Demokrasi.” *Benar News Indonesia*. Last modified 2024. Diakses Februari 2, 2025. <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/aktivis-sebut-prabowo-ancam-demokrasi-05102024150142.html>.

Mediana, Caecilia. “Dirut Agrinas Absen, Raker dengan Komisi VI DPR Ditunda.” *KOMPAS.id*. Last modified 2026. Diakses Maret 18, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/dirut-agrinas-absen-raker-dengan-komisi-vi-dpr-ditunda>.

Mulya, Fath Putra. “Romo Magnis Sebut Partai Oposisi Penting Untuk Demokrasi.” *ANTARA*. Last modified 2024. Diakses Februari 9, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4158918/romo-magnis-sebut-partai-oposisi-penting-untuk-demokrasi>.

Nugroho, Novali Panji. “Prabowo Sebut Oposisi Bukan Budaya Indonesia, Ajak Elite Partai Kolaborasi.” *Tempo.co*. Last modified 2024. Diakses Februari

- 9, 2025. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-sebut-oposisi-bukan-budaya-indonesia-ajak-elite-partai-kolaborasi-15063>.
- Ode, Samsul. “‘Reshuffle’: Politik Kursi atau Kursi Politik?” *KOMPAS.id*. Last modified 2025. Diakses Maret 18, 2026. https://www.kompas.id/artikel/reshuffle-politik-kursi-atau-kursi-politik?open_from=Tagar_Page.
- Pramudito. “Oposisi dan Perimbangan Kekuatan.” *KOMPAS.id*. Last modified 2021. Diakses Maret 18, 2026. https://www.kompas.id/artikel/oposisi-dan-perimbangan-kekuatan?open_from=Search_Result_Page.
- Rizaldi, Bagus Ahmad. “Peneliti Politik: Negara Akan Kuat Karena Oposisi yang Kuat.” *ANTARA*. Last modified 2024. Diakses Februari 10, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4080222/peneliti-politik-negara-akan-kuat-karena-oposisi-yang-kuat>.
- Suryaningtyas, M Toto. “Nuansa Otoritarianisme Menggerogoti Demokratisasi.” *KOMPAS.id*. Last modified 2025. Diakses Maret 29, 2026. https://www.kompas.id/artikel/nuansa-otoritarianisme-menggerogoti-demokratisasi?open_from=Search_Result_Page.
- Susilo, Nina. “MBG dan Koperasi Merah Putih Tak Tersentuh Penghematan.” *KOMPAS.id*. Last modified 2026. Diakses Maret 29, 2026. https://www.kompas.id/artikel/penerimaan-negara-dioptimalkan-pajak-perusahaan-dikejar?open_from=Search_Result_Page.
- Umum, Komisi Pemilihan. “Perolehan Suara dan Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024.” *Badan Pusat Statistik*. Last modified 2025. Diakses Maret 18, 2026. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE2OSMx/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat--dpr--menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun-2009--2014--2019-dan-2024.html>.
- Utami, Kristi Dwi. “Penangkapan Aktivis Terkait Demo Agustus Terus Terjadi, Apa Dampaknya?” *KOMPAS.Id*. Accessed May 9, 2026. <https://www.kompas.id/artikel/penangkapan-aktivis-terkait-demonstrasi->

agustus-terus-terjadi-apa-dampaknya.

Wahyu, Yohan. "Rekam Jejak PDI-P Menjadi Oposisi di Era SBY." *KOMPAS.id*.
Last modified 2024. Diakses September 30, 2025.
<https://www.kompas.id/artikel/rekam-jejak-pdi-p-menjadi-oposisi-di-era-sby>.